

**BASELANG**

Jurnal Ilmu Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Lingkungan
e-journal.faperta.universitasmuarabungo.ac.id

**Pembangunan Pertanian :
Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pertanian Di Indonesia
(Artikel Review)**

*Agricultural Development:
The Role Of Government in Agricultural Development
(Article Review)*

M. Eka Wijaya, Fuji Kacaya Mita, Evo Afrianto, Asminar
Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muara Bungo

Article Info

*Keywords : goverment,
development, agricultural*

Email:

mekawijaya94@gmail.com,
fujikacaya@gmail.com,
evo_juventini@yahoo.com,
asminarjabir@yahoo.com

Program Studi Agribisnis, Fakultas
Pertanian, Universitas Muara
Bungo, Jl. Pendidikan, Rt.10 Rw.02
No.10 Kelurahan Sungai Binjai.
Kecamatan Bathin III. Kabupaten
Bungo, Jambi 37288, Indonesia

ABSTRAK

Pembangunan Pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya manusia di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan. pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral dari pada pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Secara luas pembangunan pertanian bukan hanya proses atau kegiatan menambah produksi pertanian melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, perilaku, lembaga, sosial dan sebagainya demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Pertanian merupakan sektor utama penghasil bahan-bahan makanan dan bahan-bahan industri yang dapat diolah menjadi bahan sandang, pangan, dan papan yang dapat dikonsumsi maupun diperdagangkan, maka dari itu pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi.

Kata kunci: pemerintah, pembangunan, pertanian

ABSTRACT

Agricultural development is a process aimed at continuously increasing agricultural production in order to increase agricultural production for each consumer, which at the same time increases the income and business productivity of each farmer by increasing capital and skills to increase human involvement in the development of crops. plants and

animals. Agricultural development is an integral part of economic development and society in general. Broadly speaking, agricultural development is not just a process or activity to increase agricultural production but is a process that produces social changes in values, norms, behavior, institutions, social and so on in order to achieve economic growth and improve the welfare of farmers and society. Agriculture is the main sector producing food ingredients and industrial materials that can be processed into clothing, food, and board materials that can be consumed or traded, therefore agricultural development is part of economic development.

Keywords: government, development, agricultural

Pendahuluan

Sektor pertanian masih menjadi unggulan dan basis ekonomi bagi masyarakat perdesaan. Sektor pertanian berperan dalam menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menyediakan tenaga kerja dan pangan. Pembangunan pertanian harus difokuskan pada komoditas-komoditas unggulan dengan tujuan mengurangi biaya produksi, meningkatkan produksi dan produktivitas, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan pendapatan petani. Pengembangan komoditas unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian agroekosistemnya guna meningkatkan produktivitas dan nilai jualnya. Lebih jauh Ittersum et al. (2008) menyatakan bahwa kebijakan pembangunan pertanian dirancang untuk meningkatkan kontribusinya terhadap keberlanjutan pertanian dan pembangunan berkelanjutan pada umumnya. (Mulyono dan Munibah. 2016),

Berdasarkan pembukaan UDD 1945 alenia ke-4 tentang peran pemerintah yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Memberikan arti bahwa pemerintah mempunyai peran sentral dalam pembangunan nasional dalam kesejahteraan rakyat. Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah masyarakat agraris maka sumbangsi yang berpotensi besar dalam

pembangunan Nasional adalah bidang pertanian, ditunjukkan oleh sebagian besar pendapatan mereka berasal dari produk pertanian seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kenyataan yang harus diakui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil. (Ahmar, dkk. 2016)

Paradigma pertanian untuk pembangunan (agriculture for development) dinyatakan bahwa pembangunan perekonomian nasional dirancang dan dilaksanakan berdasarkan tahapan pembangunan pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak pembangunan. Penempatan kedudukan (positioning) sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan mewujudkan Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur. Tahapan pencapaian dan peta jalan transformasi struktural merupakan landasan untuk menetapkan posisi sektor pertanian dalam pembangunan nasional. (Indraningsih. 2018)

Anda yang berlatar belakang ekonomi pertanian atau ekonomi pembangunan pasti pernah membaca atau minimal mendengar literatur klasik pembangunan pertanian karya Arthur Mosher yang berjudul "Getting Agriculture Moving" atau lebih dikenal dalam Bahasa Indonesia dengan judul "Menggerakkan Sektor Pertanian." Walaupun saat ini karya tersebut telah terbilang klasik, kontribusi yang tidak terlupakan dari Mosher adalah kemampuannya menjelaskan secara

seederhana dan gampang tentang syarat pokok dan syarat pelancar dalam pembangunan pertanian. Ketersediaan pasar hasil, perubahan teknologi, faktor produksi, sistem insentif, dan transportasi dianggap sebagai syarat pokok; sedangkan faktor pendidikan, kredit produksi, kelembagaan petani, rehabilitasi lahan dan perencanaan pembangunan dikelompokkan sebagai syarat pelancar pembangunan pertanian. Beberapa negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia, bahkan dengan sabar mengikuti saran dan langkah kebijakan yang disarankan oleh Mosher (Arifin. 2005).

Sumber daya alam yang ada di muka bumi merupakan sumber daya esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilang atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam tersebut akan berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut, agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri (Kurniawan dan Rustan. 2020).

Perencanaan pembangunan di Indonesia menggariskan bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan berbasis kerakyatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945. Namun dalam realitas pelaksanaan pembangunan masih jauh dari harapan masyarakat pada umumnya, hal ini terlihat dari gambaran kehidupan masyarakat yang masih banyak hidup di tempat-tempat yang kurang layak, banyaknya masyarakat yang mengadu nasib ke negeri orang karena kehidupan di kampung halaman mereka tak memiliki pekerjaan, dari data statistik menunjukkan jumlah pengangguran masih banyak, dan banyaknya masyarakat mengeluhkan peranan pemerintah dalam menanggulangi kondisi sosial yang mereka alami terutama pada persoalan lapangan kerja, kebutuhan pokok dan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang masih dianggap sangat kurang utamanya pada sektor pertanian. (Mulda. 2017).

Di lain pihak, pemerintah pada semua tingkatan khususnya di tingkat terbawah dituntut untuk selalu memberikan pembinaan, agar pembangunan berjalan dengan baik dan

berhasil, maka menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat, memberikan dorongan atau motivasi, sehingga senantiasa tumbuh kesadaran akan pentingnya untuk selalu ikut serta berperan/berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan pertanian yang merupakan potensi terbesar Indonesia sebagai negara agraris. Kebijakan pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2013, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Undang-undang ini menyebutkan bahwa petani perlu mendapat perlindungan secara optimal dalam menghadapi permasalahan atau kesulitan dalam : (1) memperoleh sarana dan prasarana produksi (saprodi), (2) kepastian usaha, (3) resiko harga, (4) kegagalan panen, (5) praktek ekonomi biaya tinggi, dan (6) perubahan iklim (Hamid. 2018).

Peran pemerintah daerah sangat menentukan kebijakan pembangunan ekonominya. Kesiapan dalam perencanaan dan pengelolaan di dalam menggalang berbagai pelaku, serta keseriusan dan komitmen terhadap pelaksanaan pembangunannya. Pemerintah daerah dalam upaya memantapkan otonomi daerah dan persiapan menghadapi tantangan ke depan serta mengupayakan pengelolaan pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan efisien, dengan memanfaatkan potensi daerah dan daya dukung yang dimiliki. Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata pada penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian yang dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan pertanian diharapkan dapat memperbaiki

pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. (Lepa, dkk. 2019).

Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk membahas tentang peran pemerintah dalam pembangunan pertanian.

Metode Penelitian

Penelitian-penelitian sebelumnya memperoleh sumber data yang dilakukan dengan metode kualitatif. Metode yang dilakukan cara pertama ini dengan menggunakan metode eksploratif dan pendekatan induktif. Sifat dari penelitian eksploratif adalah kreatif, fleksibel, terbuka, dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber informasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan keterlibatannya observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Observasi Partisipan (Participant Observation) dan Observasi Non Partisipan (Non Participant Observation). Penelitian yang dilakukan, menggunakan teknik Observasi Non Partisipan. Observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan petani (Hamid. 2018).

Metode dasar penelitian lainnya adalah Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan berbagai data dilapangan dan melakukan analisis yang mendalam terhadap data-data maupun pada persoalan-persoalan yang terjadi. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data data yang diperoleh. Serta hasil hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian (Mulda. 2017).

Metode lainnya adalah dengan pemilihan Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan dilengkapi dengan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber kunci menggunakan kuesioner terstruktur. Data

tersebut mencakup hasil penilaian dari faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, seperti karakteristik petani, penguasaan lahan, aksesibilitas dan infrastruktur, dan struktur biaya usahatani yang digunakan dalam pembobotan pada komponen dan faktor-faktor SWOT. Data data tersebut dianalisis dengan pendekatan. (Mulyono dan Munibah. 2016).

Jenis penelitian lainnya adalah jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian adalah tipe penelitian fenomenologis. Sumber data yakni data primer dan data sekunder. Informan penelitian yakni petani, Ketua GAPOKTAN Kepala Desa, Penyuluh, dan Kepala BP3K. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan observasi. (Ahmar, dkk. 2016.)

Hasil dan Pembahasan

Kemiskinan merupakan masalah yang menarik untuk dikaji, sebab hal ini hampir terjadi pada setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kendala yang sering dihadapi dalam melaksanakan pembangunan di pedesaan pada umumnya adalah masih rendahnya tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan penduduk, faktor dan kendala yang dihadapi masyarakat pedesaan yaitu petani pada khususnya adalah pola pikir dan tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat tani rata-rata masih rendah. Indikator Peran Pemerintah adalah Fasilitatoryaitu Pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Fasilitator adalah orang yang menyediakan berbagai fasilitas dalam memperlancar proses komunikasi, inovasi dan menciptakan karya sehingga mampu memahami dan memecahkan masalah bersama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan (Ahmar, dkk. 2016).

Sejak awal tahun 1970, paradigmapembangunan pertanian di Indonesia berubah drastis seiring perubahan paradigma pembangunan ekonomi kapitalistis yang bertumpu pada modal besar. Dalam kerangka pembangunan ekonomi saat itu, sektor pembangunan pertanian tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi ekonomi

nasional, tetapi dijadikan buffer (penyangga) guna menyukseskan industrialisasi yang dijadikan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan produksi pertanian, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi tersebut dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu perluasan areal tanam atau areal panen dan peningkatan produktivitas per satuan luas areal. Peningkatan produktivitas dapat dicapai antara lain melalui penggunaan benih unggul bermutu dan pemupukan berimbang dalam jumlah yang memadai. Namun karena sebagian besar produsen pertanian di Indonesia adalah petani berskala kecil yang modalnya terbatas, Pemerintah mendorong untuk memberikan subsidi pupuk agar petani mempunyai kemampuan dan aksesibilitas yang lebih tinggi terhadap input produksi tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan subsidi diarahkan untuk mencapai Tujuan Antara dan Tujuan Akhir. Yang dimaksudkan dengan Tujuan Antara adalah meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi. Sementara Tujuan Akhir adalah meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional (Lepa, dkk. 2019).

Penyuluhan pertanian adalah upaya menyampaikan informasi yang berkaitan dengan bidang pertanian oleh penyuluh pertanian kepada petani beserta anggota keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu menggunakan inovasi teknologi pertanian baru. Penyuluhan berperan dalam peningkatan pengetahuan petani akan teknologi maupun informasi-informasi pertanian yang baru guna meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Peran penyuluhan dalam memberikan pengetahuan kepada petani dapat berfungsi sebagai proses penyebarluasan informasi kepada petani, sebagai proses penerangan, sebagai proses perubahan perilaku petani (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), dan sebagai proses pendidikan. Penyuluhan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman yang

dibudidayakan petani serta dapat mensejahterakan petani. Adapun wawancara dengan Bapak M. Dawi, S.P salah seorang informan dari pegawai BPP mengemukakan bahwa : "... Penyuluh pertanian sangat berperan penting dalam bidang penyuluhan guna mencapai kesuksesan dalam bertani. BPP atau dalam hal ini penyuluh memiliki tugas menyampaikan informasi, menyediakan fasilitas, dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi petani di lapangan (Wawancara, 4 Maret 2019). Senada juga yang disampaikan oleh anggota kelompok tani yang bernama Bapak Didik beliau mengatakan bahwa : "...Kami meminta masukan atau petunjuk dari penyuluh pertanian mengenai upaya pemberantasan hama serta BPP berperan sebagai jembatan atau perantara dari pemerintah ke petani guna mendapatkan berbagai macam bantuan (Wawancara, 4 Maret 2019). Dari pernyataan kedua informan tersebut, dapat di ketahui bahwa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Wonomulyo atau dalam hal ini petugas penyuluh pertanian memiliki peran penting, yaitu sebagai kegiatan yang merupakan katalis, pendamping, perantara, dan penemu solusi bagi pembangunan pertanian khususnya di Kecamatan Wonomulyo. Penyuluhan mampu meningkatkan kesejahteraan petani yang diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani, perbaikan usaha tani, dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakat. (Kurniawan dan Rustan. 2020).

Hasil kajian menunjukkan faktor yang menjadi kekuatan dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Bantul adalah (1) pekerjaan dan penghasilan utama sebagian besar sebagai petani, (2) anggota keluarga dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja dalam melakukan usahatani, (3) pengalaman petani dalam berusahatani cukup lama, yang menurut Rangkuti (2009) dapat membentuk karakter petani menjadi orang lebih terbuka dan kompak dalam jaringan komunikasi dengan petani lain, (4) komoditas yang dibudidayakan merupakan komoditas unggulan, yaitu padi sawah, jagung, kedelai, dan kacang tanah, (5) usahatani komoditas unggulan (padi sawah) layak diusahakan dengan R/C 2,17 (Mulyono, 2016), (6) usahatani komoditas unggulan lebih optimal

dibandingkan komoditas bukan unggulan, dan (7) aksesibilitas dan infrastruktur sangat mendukung. Aksesibilitas meliputi jarak tempat tinggal petani ke lahan pertanian/sawah 0,8-1 km, jarak ke pasar input 1,4-1,9 km, jarak ke pasar output 2,1-4,3 km dan jarak ke sumber informasi (BPP) 3,2-3,4 km (Mulyono, 2016). Infrastruktur meliputi ketersediaan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan) tersedia di lapang, serta penyuluhan rutin setiap bulan oleh penyuluh di rumah kelompok tani. (Mulyono dan Munibah, 2016).

Arah pembangunan bangsa ini akan mengalami banyak hambatan dan masalah, jika tidak punya program pembangunan yang mantap dan berkarakter, dalam artian bahwa pemerintah harus punya visi misi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat bangsa ini, tanpa harus menjadi bangsa pengekor kenegara lain. Keseriusan pemerintah dalam membangun sektor pertanian sama halnya membangun ekonomi dan sumber daya manusia yang bekerja disektor pertanian, lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian, maka suatu keharusan pemerintah mengarahkan kebijakan pembangunan disektor tersebut. Melihat dari kondisi seperti ini menggambarkan sebuah realitas bahwa sumber daya alam yang melimpah ruah bukanlah sebuah jaminan untuk bisa hidup sejahtera, namun banyak hal yang menjadi faktor untuk membangun sebuah bangsa yang maju salah satunya di antaranya yakni pemerintahan yang kuat dan bersih dalam hal ini pemerintah memiliki kemampuan membangun visi misi yang berorientasi pada rakyat di mana setiap kebijakan betul – betul memihak kepada masyarakat. Melalui pendekatan diatas dapat kita menarik kesimpulan sederhana dalam menyikapi peranan pemerintah dalam pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat terutama dalam peningkatan sumber pendapatan masyarakat desa dalam hal meningkatkan produksi pertanian, dari program ini di butuhkan pemahaman konsep dari setiap aparatur yang terlibat di dalamnya termasuk masyarakat. Sehingga tujuan yang di harapkan dapat terlaksana. Berkaitan dengan kebijakan dalam meningkatkan produksi pertanian, dapat dilakukan dengan melakukan

pembinaan terhadap pelaku utamanya para petani melalui pemberian berbagai pelatihan, bimbingan, penyuluhan dan pendampingan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kompetensinya, termasuk didalamnya mengembangkan inovasi, serta pengenalan teknologi pertanian. Perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia juga sangat penting, pemerintah harus lebih proaktif dalam mengembangkan kemampuan para petani baik dalam memahami kondisi tanah, bibit unggul, pupuk, hama, maupun teknologi pertanian, karena hampir dari semua petani yang ada di Indonesia tidak memiliki background pendidikan sarjana pertanian ataupun sekolah pertanian, mereka hanya bekerja menagandakan pengalaman dan bekerja secara tradisional (Mulda, 2017).

Penyuluhan sebagai ujung tombak dalam memberdayakan petani, menempatkan kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan pertanian di masing-masing tingkatan wilayah administrasi pemerintahan. Sebagai penjabaran dari UU Nomor 16/2006, Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan dengan menjadikan BPK/BP3K (Balai Penyuluhan Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan), sebagai pusat koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan yang berbasis kawasan komoditi unggulan dan atau wilayah. Selain itu, BPK/BP3K merupakan pusat data dan informasi bagi petani dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan usaha di wilayah kecamatan. Berbagai program atau kegiatan pemberdayaan petani yang telah dijalankan oleh BPP, meliputi penguatan kapasitas kelembagaan dalam bentuk pertemuan kelompok tani yang dihadiri oleh para penyuluh, KTNA, aparat desa, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan pemberdayaan petani dilaksanakan sejalan dengan program pemerintah maupun secara swadaya, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para petani agar mau dan mampu mengadopsi suatu teknologi baru yang dapat meningkatkan usaha taninya sesuai dengan program tahunan berjalan. Secara terperinci program dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan adalah

sebagai berikut : 1. Sekolah lapang pengelolaan tanaman padi (SL-PTT) padi sawah pada kawasan pemantapan dan pengembangan 2. Pengadaan alat dan mesin pertanian, seperti mesin penggilingan padi, hand traktor, dan pompa air 3. Program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) 4. Pengembangan optimasi lahan 5. Peningkatan produksi melalui budidaya padi pola system rice of intensification (SRI) 6. Peningkatan produksi melalui budidaya padi pola IPAT berbasis organik 7. Pemberdayaan petani penangkar dengan bantuan benih pokok 8. Pembangunan dan perbaikan beberapa jaringan irigasi tingkat usaha tani 9. Perbaikan administrasi kelompok tani. 10. Pembuatan jalan usaha tani Kegiatan/program tersebut diatas mendapatkan dukungan dana dari baik APBN, APBD, kerjasama pihak ketiga (BUMN dan swasta), serta swadaya masyarakat. Selain kegiatan dan program diatas, BPP sebagai unit pelaksana teknis dibawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, juga melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak/instansi, baik pemerintah maupun swasta. Kemitraan ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kinerja kelompok tani/wilayah binaan dalam hal terdiseminasinya teknologi pertanian, maupun terjalinnnya para pelaku utama dan pelaku usaha dalam sistem kerja sama yang saling menguntungkan. Bentuk kemitraan yan berlangsung di BPP Pallangga meliputi transfer teknologi maupun aspek pasar. (Hamid, 2018).

Kesimpulan

Berdasarkan pembukaan UDD 1945 alenia ke-4 tentang peran pemerintah yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sumber daya alam yang ada dimuka bumi merupakan sumber daya esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilang atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam tersebut akan berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia. Perencanaan pembangunan di Indonesia menggariskan

bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan berbasis kerakyatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945. Peran pemerintah daerah sangat menentukan kebijakan pembangunan ekonominya. Kesiapan dalam perencanaan dan pengelolaan di dalam menggalang berbagai pelaku, serta keseriusan dan komitmen terhadap pelaksanaan pembangunannya. Pemerintah daerah dalam upaya memantapkan otonomi daerah dan persiapan menghadapi tantangan ke depan serta mengupayakan pengelolaan pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan efisien, dengan memanfaatkan potensi daerah dan daya dukung yang dimiliki.

Daftar Pustaka

- Ahmar, Mappamiring, Parawangi, A, (2016), *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, (jurnal administrasi public)*, 2 (2).
- Arifin, B, (2005), *PEMBANGUNAN PERTANIAN Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi, (P-226)*, Grasindo, Jakarta.
- Hamid, H, (2018), *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,(Open Jurnal System)*, 1 (3).
- Indraningsih, K.S, (2018), *Strategi Diseminasi Inovasi Pertanian Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian,(Forum Penelitian Agro Ekonomi)*, 35 (2).
- Kurniawan, N.F, IR Rustan, (2020), *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Melalui Balai Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, (jurnal ilmu pemerintah dan ilmu komunikasi)*, 5 (1).
- Lepa, O, Pangemanan, S,Rachman, I, (2019), *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pembangunan Pertanian Studi Di Kecamatan Passi Timu, (jurnal ilmu jurusan pemerintah)* 3(3).
- Mulda, R, (2017), *Konsep Dan Arah Kebijakan Pemerintah Dalam*

*Pembangunan Pertanian Di Indonesia,
(Trias Politika), 1 (2).*

Mulyono, J, dan Munibah, K, (2016), *Strategi
Pembangunan Pertanian Di Kabupaten
Bantul Dengan Pendekatan A'WOT,*
(Jurnal Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian), 9, (3).